

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

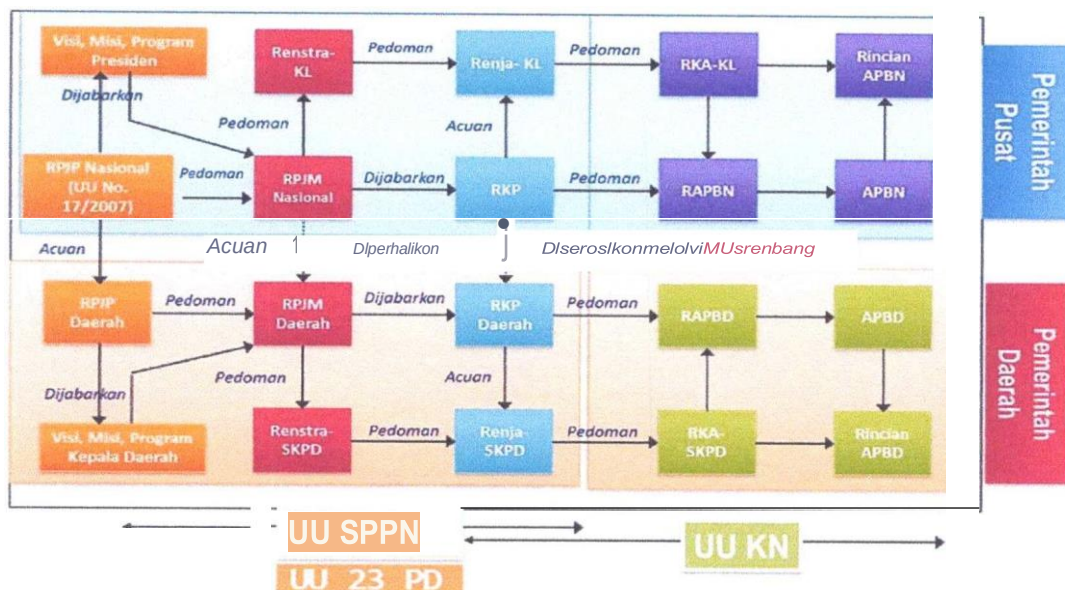
Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahan PD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja,
2. Penyiapan data dan informasi,
3. Penyusunan rancangan awal,
4. Perumusan rancangan,
5. Verifikasi rancangan,
6. Perumusan rancangan akhir,
7. Verifikasi rancangan akhir, dan
8. Penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah.

Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P). Berikut gambaran keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan Proses penyusunan APBD.



Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung tahun 2025, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55),

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung;
14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;

15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah, sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA),
2. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya melaksanakan Pelayanan,
3. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan,
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun 2025, disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen jangka menengah. Kualitas penyusunan Renja PD akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja berdasarkan realisasi dengan Triwulan II Tahun 2025.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja PD Renja berdasarkan realisasi dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari tahapan pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Renja berdasarkan realisasi dengan Triwulan II Tahun 2025 telah menggunakan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja berdasarkan realisasi dengan Triwulan II Tahun 2025 yang di ambil dari aplikasi <https://monev.belitung.go.id/> disajikan dalam tabel di bawah ini.

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN

Tahun Anggaran 2025

TRIWULAN II

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.281.177.398,00	0,00	53,94%	2.309.449.567,00	45,14%		1.925.542.512,00	44,98%		
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.952.749,00	0,00	100,00%	5.952.749,00	16,03%		954.300,00	16,03%		
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	996.116,00	0,00	100,00%	996.116,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	971.862,00	0,00	100,00%	971.862,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	999.834,00	0,00	100,00%	999.834,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	998.841,00	0,00	100,00%	998.841,00	95,54%	0,01%	954.300,00	95,54%	Tidak Ada	
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	992.298,00	0,00	100,00%	992.298,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	993.798,00	0,00	100,00%	993.798,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.757.928.409,00	0,00	49,95%	1.876.975.233,00	46,73%		1.756.429.352,00	46,74%		
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.755.953.176,00	0,00	49,92%	1.875.000.000,00	46,75%	21,43%	1.756.086.452,00	46,75%	Tidak Ada	Sudah sesuai
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	990.636,00	0,00	100,00%	990.636,00	34,61%	0,00%	342.900,00	34,61%	Tidak Ada	Penyusunan Laporan Keuangan Semester 1 Masih Dalam Proses
8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	984.597,00	0,00	100,00%	984.597,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	Laporan Prognosis sudah terlaksana di triwulan ke dua
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000,00	0,00	100,00%	35.000.000,00	50,17%		17.560.000,00	50,17%		
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000,00	0,00	100,00%	35.000.000,00	50,17%	0,21%	17.560.000,00	50,17%	Tidak Ada	Sudah ada pegawai yang mengikuti Diklat sebanyak 2 Orang
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.141.640,00	0,00	91,39%	169.204.985,00	48,02%		81.638.088,00	44,09%		

8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.700,00	0,00	100,00%	4.999.700,00	37,67%	0,02%	1.883.600,00	37,67%	Tidak Ada	Sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kantor
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.772.440,00	0,00	89,61%	28.471.185,00	70,15%	0,27%	22.289.700,00	70,15%	Tidak Ada	Sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kantor
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.995.400,00	0,00	80,07%	4.000.000,00	12,75%	0,01%	881.600,00	17,65%	Tidak Ada	Sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kantor
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.004.100,00	0,00	88,56%	56.684.100,00	48,95%	0,38%	31.331.438,00	48,95%	Tidak Ada	Sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kantor
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.690.000,00	0,00	80,08%	17.370.000,00	17,76%	0,05%	3.853.200,00	17,76%	Tidak Ada	Sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kantor
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.680.000,00	0,00	100,00%	7.680.000,00	32,55%	0,03%	2.500.000,00	32,55%	Tidak Ada	Sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kantor
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	0,00	100,00%	50.000.000,00	52,84%	0,32%	18.898.550,00	37,80%	Tidak Ada	sudah sesuai dengan undangan dan keperluan untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.634.600,00	0,00	57,95%	89.034.600,00	34,42%		52.874.072,00	34,42%		
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	0,00	80,00%	2.000.000,00	40,00%	0,01%	1.000.000,00	40,00%	Tidak Ada	Sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kantor
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.600.000,00	0,00	71,71%	37.000.000,00	20,16%	0,13%	10.401.322,00	20,16%	Tidak Ada	Sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kantor
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.534.600,00	0,00	50,27%	50.034.600,00	41,67%	0,51%	41.472.750,00	41,67%	Tidak Ada	Sudah sesuai
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.520.000,00	0,00	92,87%	133.282.000,00	11,21%		16.086.700,00	11,21%		
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.868.000,00	0,00	100,00%	18.868.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	Sesuai dengan kebutuhan dan keperluan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.253.000,00	0,00	84,84%	31.605.000,00	17,04%	0,08%	6.346.700,00	17,04%	Tidak Ada	Sesuai dengan kebutuhan dan keperluan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.399.000,00	0,00	87,73%	32.809.000,00	26,04%	0,12%	9.740.000,00	26,04%	Tidak Ada	Sesuai dengan kebutuhan peralatan dan mesin yang di pelihara
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	0,00	100,00%	50.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.078.464.159,00	0,00	47,36%	510.787.000,00	4,28%		46.222.425,00	4,29%		
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.078.464.159,00	0,00	47,36%	510.787.000,00	4,28%		46.222.425,00	4,29%		
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	842.602.159,00	0,00	33,23%	280.000.000,00	4,30%	0,44%	36.260.360,00	4,30%	Tidak Ada	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	187.726.000,00	0,00	97,30%	182.651.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan ketiga
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	48.136.000,00	0,00	100,00%	48.136.000,00	20,70%	0,12%	9.962.065,00	20,70%	Tidak Ada	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan ketiga
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	1.795.516.800,00	0,00	37,03%	664.827.800,00	70,62%		1.268.030.000,00	70,62%		

	PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK										
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.795.516.800,00	0,00	37,03%	664.827.800,00	70,62%		1.268.030.000,00	70,62%		
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.694.689.000,00	0,00	33,28%	564.000.000,00	74,82%	15,48%	1.268.030.000,00	74,82%	Tidak Ada	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan ketiga
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	72.802.800,00	0,00	100,00%	72.802.800,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan ketiga
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	28.025.000,00	0,00	100,00%	28.025.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan ketiga
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	70.325.400,00	0,00	100,00%	70.325.400,00	7,81%		5.493.711,00	7,81%		
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	70.325.400,00	0,00	100,00%	70.325.400,00	7,81%		5.493.711,00	7,81%		
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	37.976.100,00	0,00	100,00%	37.976.100,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan ketiga
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	32.349.300,00	0,00	100,00%	32.349.300,00	16,98%	0,07%	5.493.711,00	16,98%	Tidak Ada	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan ketiga
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	502.676.300,00	0,00	99,50%	500.176.300,00	2,74%		13.796.094,00	2,74%		
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	502.676.300,00	0,00	99,50%	500.176.300,00	2,74%		13.796.094,00	2,74%		
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	85.948.000,00	0,00	100,00%	85.948.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan ketiga
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	354.228.300,00	0,00	100,00%	354.228.300,00	3,89%	0,17%	13.796.094,00	3,89%	Tidak Ada	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan ketiga
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	62.500.000,00	0,00	96,00%	60.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan ketiga
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS	465.259.957,00	0,00	94,86%	441.362.527,00	22,96%		106.855.540,00	22,97%		

	DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL										
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	465.259.957,00	0,00	94,86%	441.362.527,00	22,96%		106.855.540,00	22,97%		
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	136.833.424,00	0,00	91,27%	124.881.094,00	8,48%	0,14%	11.605.540,00	8,48%	Tidak Ada	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan ketiga
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	88.426.533,00	0,00	86,49%	76.481.433,00	0,28%	0,00%	250.000,00	0,28%	Tidak Ada	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan ketiga
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	240.000.000,00	0,00	100,00%	240.000.000,00	39,58%	1,16%	95.000.000,00	39,58%	Tidak Ada	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan
		8.193.420.014	0	54,88%	4.496.928.594		41,17%	3.365.940.282	41,08%		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan renja perubahan tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung telah menentukan program dan kegiatan.

a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Mendukung pencapaian visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2023-2026 yaitu :

“ Terwujudnya Kabupaten Belitung yang Mandiri dan Produktif dengan memanfaatkan Sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat “

Dan mewujudkan Misi:

Misi Kesatu	Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan darana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Misi Kedua	Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah.
Misi Ketiga	Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan

b. Rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2024

Pada tahun 2024 sebanyak 6 (Enam) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung yang sifatnya Rutin dan Belanja Langsung Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Teknis) dengan ruang lingkup kegiatannya. Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai terdiri dari gaji dan tambahan Penghasilan

B. Belanja Langsung yang sifatnya Rutin (Penunjang)

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

C. Belanja Langsung Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Urusan Pemerintahan Umum)

I. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;

II. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
3. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

III. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
3. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;

IV. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pebatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
2. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pebatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota.

Adapun Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Anggaran	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah	6 Kegiatan	24 Sub Kegiatan	4.447.623.044	4.271.330.042
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Kegiatan	3 Sub Kegiatan	1.118.793.399	1.078.464.159
3.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1 Kegiatan	3 Sub Kegiatan	1.926.548.200	1.795.516.800
4.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Kegiatan	2 Sub Kegiatan	72.825.400	70.235.400
5.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Kegiatan	2 Sub Kegiatan	72.825.400	502.676.300
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1 Kegiatan	3 Sub Kegiatan	510.593.300	465.259.957
Jumlah		11 Kegiatan	38 Sub Kegiatan	8.910.965.941	8.178.248.916

- a) Sebagian besar lokasi melaksanakan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebar di semua wilayah di Kabupaten Belitung dan Luar Kabupaten Belitung.
- b) Pada tahun 2025 pagu indikatif Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang di peroleh dari Bappeda sebesar Rp. 8.178.248.916,- (Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah)
- c) Tabel perubahan rencana program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun 2025 dapat dilihat dalam table yang diambil dari aplikasi <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/> terdapat dalam table sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BELITUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Catatan	Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	APBD 2025 (Pergeseran)	RENJA Perubahan 2025 (Harmonisasi)	Usulan RENJA Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				14.933.386.593,00	8.910.965.941,00	8.193.420.014,00	8.178.248.916,00	8.178.248.916,00				
	8					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				14.933.386.593,00	8.910.965.941,00	8.193.420.014,00	8.178.248.916,00	8.178.248.916,00				
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				14.933.386.593,00	8.910.965.941,00	8.193.420.014,00	8.178.248.916,00	8.178.248.916,00				
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	7.136.136.593,00	3.763.881.158,00	3.763.881.158,00	3.763.252.151,00	3.763.252.151,00				
							2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	82,62%	82,62%	204.000.000,00	71.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00				
							3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	184.575.000,00	431.209.886,00	338.776.240,00	324.234.149,00	324.234.149,00				
							4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	260.500.000,00	181.532.000,00	143.520.000,00	143.520.000,00	143.520.000,00				
	8	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	16.262.609,00	5.952.749,00	5.952.749,00	5.323.742,00	5.323.742,00				
	8	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.668.259,00	996.116,00	996.116,00	804.442,00	804.442,00	Pengurangan ATK dan Kertas 30 sebesar %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	8	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
							Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.331.508,00	971.862,00	971.862,00	843.984,00	843.984,00	Pengurangan Kertas sebesar 30 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Dana Alokasi Umum (DAU)	

																	Semua Kel/Desa		
	8	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.072.590,00	999.834,00	999.834,00	916.785,00	916.785,00	Pengurangan ATK dan Kertas sebesar 30 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)			
	8	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.196.090,00	998.841,00	998.841,00	998.841,00	998.841,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)			
	8	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.206.790,00	992.298,00	992.298,00	895.130,00	895.130,00	Pengurangan ATK dan Kertas sebesar 30 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)			
	8	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3.787.372,00	993.798,00	993.798,00	864.560,00	864.560,00	Pengurangan ATK dan Kertas sebesar 30 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)			
	8	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	7.119.873.984,00	3.757.928.409,00	3.757.928.409,00	3.757.928.409,00	3.757.928.409,00					
	8	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	7.114.523.984,00	3.755.953.176,00	3.755.953.176,00	3.755.953.176,00	3.755.953.176,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambah Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Alokasi Umum (DAU)			
	8	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.140.000,00	990.636,00	990.636,00	990.636,00	990.636,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	8	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	3.210.000,00	984.597,00	984.597,00	984.597,00	984.597,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	8	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	204.000.000,00	71.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00				
	8	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	8	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	17 Orang	180.000.000,00	71.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	8	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	471.598.816,00	277.575.286,00	185.141.640,00	170.599.549,00	170.599.549,00				
	8	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor												
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.350.000,00	4.999.700,00	4.999.700,00	3.499.790,00	3.499.790,00	Pengurangan Alat Listrik sebesar 30 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	8	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	53.500.000,00	39.985.186,00	31.772.440,00	25.930.259,00	25.930.259,00	Pengurangan ATK dan Kertas sebesar 30 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	8	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.490.000,00	6.909.600,00	4.995.400,00	4.995.400,00	4.995.400,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	

8	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	116.018.816,00	74.398.800,00	64.004.100,00	56.804.100,00	56.804.100,00	Pengurangan BBM sebesar 30 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
8	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	26.750.000,00	23.602.000,00	21.690.000,00	21.690.000,00	21.690.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
8	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.490.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
8	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	255.000.000,00	120.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
8	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Barang Milik Daerah	2 Jenis	2 Jenis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	02	01	2.07	0005	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
8	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
8	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	184.575.000,00	153.634.600,00	153.634.600,00	153.634.600,00	153.634.600,00				

8	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.675.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
8	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	74.900.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
8	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	107.000.000,00	99.534.600,00	99.534.600,00	99.534.600,00	99.534.600,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
8	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	4 Jenis	4 Jenis	260.500.000,00	181.532.000,00	143.520.000,00	143.520.000,00	143.520.000,00				
8	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	32.100.000,00	28.988.000,00	18.868.000,00	18.868.000,00	18.868.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
8	02	01	2.09	0005	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	74.900.000,00	65.145.000,00	37.253.000,00	37.253.000,00	37.253.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
8	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	49 Unit	53.500.000,00	37.399.000,00	37.399.000,00	37.399.000,00	37.399.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
8	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
2	8	01	02				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	2.161.400.000,00	1.118.793.399,00	1.078.464.159,00	1.078.464.159,00	1.078.464.159,00			
	8	01	02	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Laporan Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3 Dokumen	3 Dokumen	2.161.400.000,00	1.118.793.399,00	1.078.464.159,00	1.078.464.159,00	1.078.464.159,00			Masyarakat, Pelajar, Stake Holder, Instansi Vertikal dan Forum yang ada di Kesbangpol
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan												
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	45 Orang	45 Orang	165.850.000,00	800.268.399,00	842.602.159,00	842.602.159,00	842.602.159,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan												
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 Orang	300 Orang	288.900.000,00	236.719.000,00	187.726.000,00	187.726.000,00	187.726.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	8	01	02	2.04	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan												
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan	1 Laporan	1 Laporan	214.000.000,00	81.806.000,00	48.136.000,00	48.136.000,00	48.136.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	

							Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									Semua Kel/Desa		
3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%	100%	1.717.725.000,00	1.926.548.200,00	1.795.516.800,00	1.795.516.800,00	1.795.516.800,00				
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Laporan Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3 Dokumen	3 Dokumen	1.717.725.000,00	1.926.548.200,00	1.795.516.800,00	1.795.516.800,00	1.795.516.800,00				Partai Politik, Stake Holder, dan Instansi Vertikal Lainnya
	8	01	03	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												
						Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		10 Dokumen	10 Dokumen	1.396.725.000,00	1.714.689.000,00	1.694.689.000,00	1.694.689.000,00	1.694.689.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	8	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	210 Orang	210 Orang	160.500.000,00	123.257.200,00	72.802.800,00	72.802.800,00	72.802.800,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	160.500.000,00	88.602.000,00	28.025.000,00	28.025.000,00	28.025.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terbina	100%	100%	112.350.000,00	72.825.400,00	70.325.400,00	70.325.400,00	70.325.400,00				
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Laporan Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2 Dokumen	2 Dokumen	112.350.000,00	72.825.400,00	70.325.400,00	70.325.400,00	70.325.400,00				Ormas yang ada di Kabupaten Belitung
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah												
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	50 Orang	53.500.000,00	40.476.100,00	37.976.100,00	37.976.100,00	37.976.100,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas												

							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	58.850.000,00	32.349.300,00	32.349.300,00	32.349.300,00	32.349.300,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
5	8	01	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan masalah ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	100%	1.519.400.000,00	510.593.300,00	502.676.300,00	502.676.300,00	502.676.300,00			
	8	01	06	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Laporan Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	3 Dokumen	3 Dokumen	1.519.400.000,00	510.593.300,00	502.676.300,00	502.676.300,00	502.676.300,00			Masyarakat, Pelajar, Stake Holder, Instansi Vertikal dan Forum yang ada di Kesbangpol
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	588.500.000,00	87.265.000,00	85.948.000,00	85.948.000,00	85.948.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	802.500.000,00	340.828.300,00	354.228.300,00	354.228.300,00	354.228.300,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	1 Laporan	1 Laporan	128.400.000,00	82.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		

							Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
0																		
6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	100%	100%	1.637.300.000,00	834.582.598,00	465.259.957,00	465.259.957,00	465.259.957,00				
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Laporan Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Laporan Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3 Dokumen	3 Dokumen	1.637.300.000,00	834.582.598,00	465.259.957,00	465.259.957,00	465.259.957,00				Masyarakat, Stake Holder, Forkopimda, Intel Instansi Vertikal dan Forum yang ada di Kesbangpol
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	75 Orang	75 Orang	535.000.000,00	238.541.566,00	136.833.424,00	136.833.424,00	136.833.424,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	246.300.000,00	133.841.032,00	88.426.533,00	88.426.533,00	88.426.533,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		

	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	856.000.000,00	462.200.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	J U M L A H									14.933.386.593,00	8.910.965.941,00	8.193.420.014,00	8.178.248.916,00	8.178.248.916,00				

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun 2025 disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun 2025 telah disusun dan berorientasi pada Rancangan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Dengan tersusunnya Rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kinerja yang signifikan dalam melaksanakan seluruh sasaran-sasaran strategisnya dalam mencapai dan mewujudkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung. Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam pembahasan pada Forum Perangkat Daerah dan kerangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai dan diiringi peran aktif seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Belitung. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Tanjungpandan, 2025
Kepala Badan Kesbangpol Kab. Belitung

FEDY MALONDA, S. H
Pembina Utama Muda
NIP. 196910081998031008

